

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
DESA PAJAR BULAN KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI



**Nama : Chandra
NIM : 22 2014 239**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
DESA PAJAR BULAN KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Chandra
NIM : 22 2014 239**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chandra
Nim : 22 2014 239
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Dalam : Peningkatan Pembangunan Dan Perekonomian Desa
Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten
Ogan Ilir

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Sastra Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya serta sanksi hanya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi

Palembang, 2020
Yang membuat pernyataan,



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam
Peningkatan Pembangunan Dan Perekonomian Desa Pajar
Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
Nama : Chandra
NIM : 22 2014 239
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal 2020

Pembimbing I,

Betri, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II,

Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Setiap manusia mempunyai masalah yang berbeda-beda, tetapi masih banyak orang yang lebih susah hidupnya dari pada kita, maka bersyukurlah*
- *Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau dapatkan*

Kupersembahkan kepada:

- *Bapak dan ibu*
- *Kakek dan neneku*
- *Saudara-saudaraku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil A'lamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam Peningkatan Pembangunan dan Perekonomian Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan dan kemudahan serta kelancaran penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, Ayah (Amindra), Ibu (Uliah), saudara-saudaraku, yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi semangat serta kasih sayang yang begitu besar dan luar biasa kepada penulis, karena penulisan skripsi ini tidak akan pernah terjadi dan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari kedua orang tuaku. Serta penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Betri

Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E, M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang .
2. Bapak Drs H. Fauzi Ridwan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak.,CA Selaku Ketua program studi dan Ibu Nina Sabrina, S.E, M.Si, Selaku Sekertaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nurul Hutami Ningsih S.E.,M.Si. selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan dan Seluruh Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian. Akhirukalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada semua pihak yang

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang, 2020

Penulis

Chandra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Desa	10
2. Anggaran Desa.....	11
a. Pengertian Anggaran.....	11
b. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik	12
c. Fungsi Anggaran	12
d. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik	14
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	15

a. Pengertian APBDes.....	15
b. Peran Masyarakat dalam Penyusunan APB-Desa.....	18
4. Pembangunan Desa.....	19
B. Penelitian Sebelumnya.....	23

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Data yang Diperlukan	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	34
1. Analisis Data	34
2. Teknik Analisis	35

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
2. Lokasi Wilayah	37
3. Desa Pajar Bulan.....	37
B. Pembahasan.....	53
1. Pendapatan Desa Pajar Bulan.....	54
2. Belanja Desa Pajar Bulan.....	55
3. Pembiayaan Desa	58

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. ,Simpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Laporan Pendapatan dan Belanja Desa.....	7
Tabel II.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya	29
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	32
Tabel IV.1 Lokasi Wilayah Desa Pajar Bulan	37
Tabel IV.2 Pendapatan Desa Pajar Bulan	54
Tabel IV.3 Belanja Desa Pajar Bulan	56
Tabel IV.4 Pembiayaan Desa Pajar Bulan	5

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan ilir	41

DAFTAR LAMPIRAN

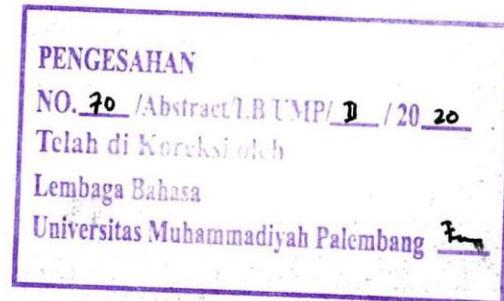
- Lampiran 1. Data Anggaran Pendapatan Belanja Desa
- Lampiran 2. Sertifikat Toefl
- Lampiran 3. Surat Riset Penelitian
- Lampiran 4. Sertifikat Hafalan Surat-surat Pendek
- Lampiran 5. Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 6. Biodata Penulis
- Lampiran 7. Plagiarisme Checker

Abstract

Chandra / 222014239/2020 / The Analysis of Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Increasing Development and Economy of Pajar Bulan Village, Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir/ Public Sector Accounting.

The problem of this study was how the analysis of APBDesa in increasing development and economic Development of Pajar Bulan Village, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. The objective of this study was to find out the analysis of APBDesa in increasing development and economic Development of Pajar Bulan Village, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. This study was a descriptive study. The data used were primary and secondary data. Data collection techniques were using observation and documentation. Data analysis methods used in this study were qualitative and quantitative analysis. The results showed that the APBDesa of Pajar Bulan Village Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir showed a surplus due to programs that had not yet been implemented. In addition, Pajar Bulan Village, Kecamatan Tanjung Batu does not yet have a BUMdes as a village government program. Pajar Bulan Village Financing in 2017 a surplus of IDR 248,158,000 and in 2018 amounted to a surplus of IDR 22,100,000.

Keywords: Revenue and Expenditure Budget (APBDesa)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada diperdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot, namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah.

Undang-undang yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, undang-undang No.6 tahun 2014. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Namun jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya perlu adanya laporan pertanggungjawaban desa.

Menurut peraturan Menteri No 113 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana Desa. Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2017), Filosofi Dana Desa adalah meningkatkan Kesejahteraan dan pemerintahanpembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut Sumpeno (2011:213) APBDes merupakan suatu

rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.

Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.

V. Wiratna (2015: 123) menjelaskan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa.

Didalam Permendagri No 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan memberikan landasan bagi otonom daerah secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan desa berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014, seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggungjawab terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Permendagri No 113 tahun 2014 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pemerintah desa wajib menyusun

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan (*planning*) adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati atau Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan yang disampaikan ke Bupati melalui Camat yaitu Laporan Realisasi pengguna dana desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa setiap akhir tahun anggaran. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Sedangkan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Laporan keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Menurut Chabib (2015: 3), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Mulyadi dkk (2006:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. .

Beberapa fenomena dikemukakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikutip dari kompas.com. sekitar 87 laporan dugaan korupsi terkait dana desa yang masuk ke KPK ditindak lanjuti, jumlah tersebut merupakan bagian dari total 363 laporan dugaan penyimpanan dana desa yang masuk dari laporan masyarakat, Febri mengatakan KPK berharap partisipasi masyarakat lebih luas terkait pemantauandadesa di masing-masing lokasi mereka.

Fenomena Selanjutnya dikemukakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dikutip dari kompas.com. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta partisipasi masyarakat dalam mengawal dana desa, pengawalan perlu dilakukan, sebab Eko menyadari penyaluran dana desa rentan diselewengkan. Eko mengatakan bahwa dirinya meminta bantuan juga dari pemerintahan dalam negeri dalam mengawal dana desa supaya partisipasi masyarakat semakin tinggi dalam mengawasi penyelewengan dana desa oleh aparat desa.

Fenomena Selanjutnya dikemukakan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dikutip dari kompas.com. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, cukup banyak pelanggaran yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa, setidaknya ada 214 kasus berkaitan dengan penyelewengan dana desa yang ditangani Polri dalam lima tahun terakhir. Selain menangani kasus dana desa kapolri juga berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun dan menganggarkan penggunaan dana desa untuk program yang dibutuhkan.

Fenomena Selanjutnya dikemukakan oleh Ahmad Heri Firdaus dari kompas.com mengatakan program pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di desa sudah baik. Namun nyatanya kemiskinan tetap tinggi, sehingga disinyalir ada kendala dalam pelaksanaan program tersebut yang menjadikannya tidak efektif atau tidak tepat sasaran. "Ini tanda pengelolaannya tidak baik. Kalau dilihat lagi, untuk masyarakat 20 persen golongan atas meningkat lebih tinggi dari masyarakat golongan bawah. Pertanyaannya, apakah uang ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang punya akses ke elit-elit daerah.

Fenomena selanjutnya dikemukakan oleh Rostin dari Kompas.com pembangunan jalan itu akan dilanjutkan dengan menggunakan dana desa 2016. Selain itu, Desa Dunu juga berencana akan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di bidang perdagangan pupuk dan obat-obatan. "Kita akan memanfaatkan ini untuk mendirikan BUMDesa agar masyarakat juga terbantu," ujarnya. Kemajuan pertanian dan ekonomi masyarakat di Desa Dunu merupakan satu dari sekian banyak dampak program dana desa. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) memang menyarankan agar dana desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi.

Tabel I.1
Laporan Pendapatan Desa Dan Belanja Desa
Kecamatan Tanjung Batu Desa Pajar bulan

TAHUN	PENDAPATAN DESA (Rp)		BELANJA DESA (Rp)	
2017	a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	1.000.000	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	155.350.000
	b. Dana Desa	767.169.000	b. Bidang Pembangunan Desa	637.169.000
	APBN	258.908.000	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	0
	c. ADD Kabupaten	93.600.000	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	79.745.000
	d. Bantuan Keuangan Kabupaten			
	Total	1.120.677.000	Total	872.519.000
2018	a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	2.000.000	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	297.350.000
	b. Dana Desa	692.386.000	b. Bidang Pembangunan Desa	759.161.000
	APBN	383.825.000	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	0
	c. ADD Kabupaten	46.800.000	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	73.600.000
	d. Bantuan Keuangan Kabupaten	11.100.000	e. Bantuan Keuangan Kabupaten SILPA TA 2017	46.800.000
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten SILPA TA 2016		f. Bantuan Keuangan Kabupaten SILPA TA 2016	11.100.000
	Total	1.140.111.000	Total	1.118.011.000

Sumber : Kantor Desa Pajar Bulan 2019

Berdasarkan tabel I.1 Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah daerah. Dari data tersebut belanja pada desa Pajar Bulan selama tahun 2017 dan 2018 selalu dibawah pendapatan desa, hal ini dikarenakan tidak sesuainya program yang dianggarkan. Berdasarkan tabel I.1 pada tahun 2017 selisih Rp 248.158.000 dan pada tahun 2018 pendapatan desa mengalami surplus, karena pendapatan desa lebih besar dari pada belanja desa selisih Rp 22.100.000. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik penelitian yang berjudul **“Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Dan Perkonomian Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Dan Perkonomian Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Dan Perkonomian Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, penulis dapat mengetahui Bagaimana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Dan Perkonomian Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir.

2. Bagi Masyarakat Desa Pajar Bulan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi mengenai Bagaimana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Dan Perkonomian Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan refrensi serta dapat menambah wawasan dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. (2012). *Pemberdayaan (Empowerment): Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Bernardus Seran Kehik dan Medan Yonathan Mael. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering, Agrimor 2 (4) 59-62, International Standard of Serial Number 2502-1710, hal 1-4. Ojs.uma.ac.id*.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokus Media*.
- Dahyar Daraba. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora, Volume 19 No. 1, hal 1-7. Jurnal.unpad.ac.id*.
- Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-SosioEkonomiUnsrat,ISSN 1907– 4298 ,Volume 13 Nomor 2A, hal 1-8. Ejournal.unsrat.ac.id*
- Lutfhi Nur Fahri. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik Vol. 11; No. 01, hal 1-14. journal.uniga.ac.id*
- Made Krisna Kalpika Sunu dan Made Suyana Utama. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.8 (2019):843-872, ISSN : 2337-3067, hal 1-30. Ojs.uma.ac.id*.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mulyadi. (2006.) *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Novianti Ruru, Lintje Kalangi dan Novi S. Budiarmo. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1), hal 1-8. *Ojs.uma.ac.id*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014)
- Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto. (2011). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar dan Sriniyati (2019) Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol ,4 No 1, hal 1-9. Ojs.uma.ac.id*.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.
- Todaro, Michael P. (2000). *Economics Development in the Third World*, The Longman Inc New York.
- Undang-Undang menurut yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, undang-undang No.6 tahun 2014.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6 (1) , hal 1-11. *Ojs.uma.ac.id*.